

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian aksi berbasis masyarakat (CBAR) terhadap anak rawan di Bandung pada umumnya menunjukkan bahwa faktor penyebab dan akibat terjadinya masalah sangat kompleks/ multidimensional, kondisi ini memerlukan pemecahan yang sistemik, terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu pendekatan PIPS terhadap masalah anak rawan dilakukan tidak saja pada anaknya tetapi juga pada lingkungannya seperti keluarga, teman sebaya dan lingkungan masyarakat lokal maupun internasional. Substansi studi sosial bagi anak rawan disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah, serta tujuannya. Tujuan studi sosial bagi anak rawan adalah bagaimana membawa mereka memiliki identitas diri, identitas nasional, memiliki solidaritas, rasa keadilan sampai menjadi warga negara yang baik. Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

1. Perubahan sosial sebagai perubahan yang normal (*the normality of change*) yang salah satunya berupa krisis multidimensional berkepanjangan telah berpengaruh pada struktur , fungsi, nilai, dan sikap masyarakat Indonesia. Perubahan ini jelas menimbulkan berbagai masalah baik yang dirasakan oleh perorangan, keluarga terutama wanita dan anak-anak seperti masalah pendidikan, kesehatan, pemukiman dan sosial-budaya. Jika masalah ini tidak dipecahkan maka akan terjadi ancaman hilangnya satu generasi (*lost generation*). Salah satu upaya untuk mencegah adalah melalui pendidikan. Salah satu bidangnya adalah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau studi sosial baik di sekolah maupun di masyarakat.

2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah anak rawan, sekalipun dalam KHA secara tegas disebut bahwa kewajiban negara memenuhi hak-hak seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi, memperhatikan pendapat mereka, mengutamakan hak untuk tumbuh kembang dan bertahan hidup serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Indikasinya antara lain masih banyaknya kasus-kasus anak seperti kekerasan, penganiayaan, perdagangan anak, pendidikan/putus sekolah, terlantar dan kekurangan gizi. Mereka ini tergolong dalam kelompok anak rawan yang merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak – anak yang karena situasi dan kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Anak rawan memiliki tiga ciri umum yaitu : *inferior, rentan dan marginal*. Yang termasuk kelompok anak rawan ini antara lain : anak jalanan, pekerja anak, anak yang dilacurkan/ayla atau eksploitasi seksual komersial anak, anak yang berkonflik dengan hukum, anak cacat, anak yang situasi darurat/sulit atau konflik bersenjata, anak yang tidak memiliki identitas yang jelas dan anak terlantar serta kekerasan anak.
3. Karakter masalah anak rawan sangat kompleks baik faktor penyebab maupun akibatnya seperti halnya karakter masalah sosial lainnya. Oleh karena itu pisau analisis yang tertera dalam kerangka teoritik juga didasarkan oleh hasil analisis terhadap anak rawan tersebut. Kerangka teoritik berkaitan dengan berbagai disiplin pendidikan ilmu sosial (*integrated knowledge system*). Mulai dari ilmu Pendidikan, Pendidikan IPS, Sosiologi, Psikologi dan Pekerjaan Sosial. Beberapa teori pendukungnya antara lain berkaitan dengan anak rawan dan lingkungannya seperti teori interaksi simbolik, teori konflik, teori sistem dan teori fungsional struktural, pengaruh perubahan sosial terhadap keluarga dan kebutuhan anak .

4. Bandung tidak berbeda dengan kota besar lain di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Ujung Pandang terdapat beberapa jenis anak rawan sekalipun jumlah dan kualitasnya masih belum pasti (dark number). Data tentang anak jalanan menurut hasil pemetaan Atmajaya dengan Kanwil Departemen Sosial dibantu oleh beberapa LSM (1999) berjumlah sekitar 6500 sementara sebelum krisis (1996) jumlahnya sekitar 3625 anak baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menyebar di beberapa kantong /pusat kegiatan seperti di terminal, alun-alun, stasiun, perempatan, pasar dan swalayan serta home industri. Informasi yang diperoleh dari salah satu LSM yang sudah cukup lama mendampingi anak rawan bahwa di beberapa wilayah binaannya (sekitar 15 kantong anak rawan antara lain : Prapatan Caringin, Pasirkoja, Pasteur, Garuda, Alun-alun, Tegalega, Kopo, Ciroyom, PTT, terminal Leuwipanjang, Stasiun Bandung, Cibolerang dan Cibarengkok) terdapat sekitar 1000 anak rawan. Mereka sebagian ada yang masih tinggal dengan orang tua,homeless dan mempunyai orang tua di luar kota seperti Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Medan, Jawa Tengah,dsb. Mayoritas alasan mereka di jalan atau bekerja karena faktor ekonomi orang tua, rendahnya pendidikan orang tua yang akhirnya berakhir pada eksploitasi orang tua. Mereka harus membantu ekonomi keluarga pada usia anak-anak. Kadang-kadang mereka harus menyeter sebagian besar dari penghasilannya untuk keluarganya. Belum lagi resiko dan bahaya yang senantiasa mengancam seperti penganiayaan, kekerasan fisik, mental dan seksual seperti sodomi dan pemerkosaan bagi anak jalanan perempuan, pemerasan, narkoba serta penularan HIV/AIDS.
5. Implikasi penelitian ini adalah peran PIPS di masyarakat semakin penting, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan

reposisi PIPS, terutama PIPS di masyarakat, mengingat permasalahan sosial yang terjadi akhir-akhir ini makin besar jumlah dan kualitasnya. Permasalahan sosial yang terjadi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun masyarakat termasuk organisasi sosial serta lembaga pemerintahan. Pakar PIPS dalam setiap penyajiannya perlu mempertimbangkan aspek psikologis sasaran atau peserta didik dengan menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial yang terdapat dalam PIPS sebagai pisau analisisnya seperti Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Geografi, Agama, Psikologi, Sejarah dan sebagainya. Sasaran PIPS di masyarakat yang berkaitan dengan anak rawan adalah anak, orang tua/walinya, teman sebaya, teman sekolah, teman bekerja, sekolahan, tempat bekerja (misal : pengusaha untuk buruh anak, majikan jika ia pembantu rumah tangga, atau pedagang asong, nelayan dan sebagainya), masyarakat dan pemerintah. Tujuan pendidikan IPS menurut Woolever (ed) (1988 : 10) antara lain : *citizenship transmission, personal development, reflective inquiry, sosial science education, rational decision making and social action* .

Ini berarti bahwa kurikulum studi sosial di masyarakat perlu didisain sesuai dengan kebutuhan, masalah dan tujuannya antara lain dapat mempersiapkan anak rawan, keluarga dan masyarakat di lingkungannya menjadi warga negara yang baik, melatih bagaimana berpikir dan menjadi pewaris budaya yang baik, bertindak sesuai keputusan rasional, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, yang pada akhirnya menjadi warga negara yang baik.

6. Pekerja sosial sebagai salah satu profesi pertolongan/tutor/pendamping anak rawan mempunyai fokus intervensi : keseimbangan interaksi antara person/ perorangan dan environment/lingkungannya. Dalam prakteknya pekerja sosial bekerja dengan

memperhatikan tiga komponen penting yaitu : knowledge (pengetahuan), skill (ketrampilan) dan attitude (sikap). Tujuan pekerjaan sosial adalah : membantu individu dan kelompok menemukan atau memperkecil masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara diri mereka dengan lingkungan (upaya preventif), menemukan sumber-sumber yang secara potensial dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara individu-individu atau kelompok-kelompok dengan lingkungan (kuratif), menemukan dan memperkuat potensi-potensi maksimum yang terdapat pada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam pendekatannya pekerjaan sosial juga menggunakan tiga metode yaitu : Social Case Work (Pekerjaan Sosial dengan individu), Social Group Work (Pekerjaan Sosial dengan Kelompok), dan Community Organization/Community Development (Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat). Dalam mendampingi anak rawan, pekerja sosial bisa berperan sebagai brocker, enabler, educator, expert, social planner, advocate, aktivis, researcher.

Persoalannya kini keberadaan profesi pekerjaan sosial belum memperoleh dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat sekalipun peranannya sangat strategis dalam memecahkan masalah sosial.

7. Hasil pengembangan model PIPS bagi anak rawan melalui ujicoba dengan pendekatan Community Base Action Research atau Penelitian Tindakan Berbasis Masyarakat, mulai dari model I (Street Based Approach/ Pendekatan anak di jalan) sampai kepada model V (Holistic Approach/Pendekatan Terpadu) melalui selter ideal (lihat gambar selter ideal) yaitu sebuah Sekolah Anak Rawan (Boarding School) sebagai Usulan Program lanjutan yang antara lain memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem asrama
- b. Biaya besar (relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan anak seperti : makan bergizi, belajar, bermain, latihan ketrampilan, beribadah, dsb.
- c. Lokasi jauh dari keramaian jalan yang mudah menggoda anak untuk kembali.
- d. Dikelola secara profesional oleh LSM
- e. Networking antar berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan)
- f. Waktu dampingan selama 24 jam, kurikulum terpadu

Model ini menggunakan prinsip, tujuan dan metode pendekatan PIPS yang menempatkan anak rawan sebagai bagian dari sistem yaitu lingkungannya. Prinsip yang digunakan mengacu pada prinsip umum Konvensi Hak Anak (1990) yaitu : *non discrimination, survival and development, participation and the best interest of the child*. Sasaran pendekatan model ini sesuai dengan fokus intervensi pekerjaan sosial sebagai bagian dari PIPS adalah “*person*” dan “*situation*” selain anak rawan (anak jalanan/buruh anak) dan orang tuanya, teman sebaya/teman bekerja, pengusaha, organisasi sosial/LSM dan supporting sistem lainnya serta masyarakat lokal, nasional/internasional (mulai dari RT, RW, Kecamatan dan Instansi terkait seperti : Depsos, Depnaker, Depkes, Depdiknas, Pemda, LPA, PKBI, Unicef, Unesco, Ausaid, LSM lain dan lembaga donor lain). Hasil yang ingin dicapai dengan model ini adalah perubahan beberapa aspek kehidupan anak rawan seperti : pengetahuan, kesadaran terhadap resiko di jalan/tempat bekerja, sikap, ekonomi, agama, pendidikan, solidaritas, pengambilan keputusan, ketrampilan, dan sebagainya sampai menjadi warga negara yang baik.

8. Outcome dari pendekatan model PIPS terpadu adalah : anak rawan akan menemukan jati dirinya sampai menjagi warga negara yang baik apabila diberikan penyadaran secara terus menerus tentang beberapa materi studi sosial seperti : agama, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi dsb yang dikemas dalam modul atau pedoman pendekatan khusus bagi anak rawan. Tujuannya antara lain menyadarkan kepada anak rawan dan lingkungannya akan hak, peran dan tanggung jawabnya baik sebagai anak, orang tua, teman, guru maupun masyarakat. Metode yang digunakan antara lain : bermain, berkelompok, modelling dalam suasana demokratis dan menyenangkan. Pelaksana langsung di lapangan adalah pekerja sosial yang sebelumnya sudah di persiapkan dengan pelatihan tentang PIPS bagi anak rawan.

B. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan reposisi guna mengembangkan peran PIPS atau studi sosial di masyarakat meliputi berbagai aspek, seperti : *visi, pendekatan, metodologi, kurikulum, sasaran, tujuan, metode, proses, media dan kompetensi instruktur/tutor/pekerja sosialnya*. Upaya reposisi yang dilakukan harus didasarkan pada analisis kebutuhan/ masalah yang berkembang di masyarakat melalui survey atau penelitian ilmiah, jika tidak maka akan terjadi model PIPS yang didisain dari policy maker atau "*top down planning*" tetapi bukan didasarkan pada "*bottom up planning*". Ini akan mengakibatkan semakin tidak sukainya materi PIPS bagi peserta didik baik di lingkungan pendidikan formal maupun di masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa materi PIPIS hanya merupakan hafalan biasa dan tidak "*meaningfull*". Substansi studi sosial yang diberikan kepada anak rawan didasarkan oleh analisis kebutuhan (asesmen), masalah dan tujuan pembelajaran,

seperti : agama, sosiologi (solidaritas), antropologi (nilai-nilai kesetiakawanan, pembangunan, dsb), pengambilan keputusan, dan kewiraswastaan/ketrampilan sosial sebagai bekal hidup mereka. Methodanya dipilih sesuai dengan kebutuhan anak seperti : socratic, modelling, bermain, berceritera dan berkelompok.

Dari hasil pengembangan PIPS di masyarakat ini akan muncul berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, media pembelajaran, modul literasi bagi anak rawan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak rawan seperti anak jalanan, buruh anak, eska, anak berkonflik dengan hukum, dsb.

2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap beberapa hal seperti:
 - a. Peninjauan/ perbaikan terhadap kebijaksanaan pembangunan sosial untuk anak-anak akan lebih dapat melindungi kebutuhan spesifik dan hak-hak anak yang berumur 0-18 tahun. Kebijaksanaan dari program intervensi yang diusulkan sebagai refleksi dari persoalan dan masalah aktual yang dihadapi anak dan remaja akan lebih ditingkatkan upaya preventif dan kuratif.
 - b. Peninjauan/perbaikan keseimbangan antara pembangunan sosial dan ekonomi seperti penambahan alokasi anggaran bagi pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan pelayanan sosial), dan lebih mencerminkan kebutuhan perlindungan spesifik dan hak-hak semua anak terutama kelompok anak rawan.
 - c. Orientasi/ pelatihan untuk berbagai komponen seperti LSM, masyarakat, lembaga pendidikan, polisi dan pejabat pemerintah tentang peraturan-peraturan yang berlaku seperti KHA dan CEDAW, kebijaksanaan dan gerakan nasional perlindungan anak seperti LPA, GNOTA , Konvensi ILO 138 dan 182.
 - d. Memberi informasi kesehatan remaja dan pemberian konseling yang sederhana dan mudah diperoleh di sekolah, di klinik atau rumah sakit umum.

- e. Pendidikan alternatif/non formal bagi anak putus sekolah yang sulit dijangkau termasuk ketrampilan hidup, penanaman cita-cita, nilai hidup bermasyarakat melalui modul literasi PIPS bagi anak rawan.
- f. Pemberdayaan keluarga dan lingkungan /sumber-sumber yang ada melalui Community Development/Community Organization.
- g. Menciptakan alternatif untuk kartu keluarga bagi anak-anak yang jarang atau tidak berhubungan dengan keluarganya, atau tidak dapat diintegrasikan lagi dengan keluarga, supaya dapat memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Selain itu juga untuk mencegah diskriminasi atau marginalisasi yang disebabkan adanya status “tidak resmi” atau ketidak

lengkapan bukti identitas.

3. Perlu adanya koordinasi (networking) lintas disiplin, profesi dan sektoral untuk melindungi anak rawan dari eksploitasi dan tindakan kekerasan di jalanan dan tempat kerja. Sebagaimana telah disebutkan di atas, intervensi efektif apapun harus siap menerima kenyataan bahwa anak rawan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Pembuat kebijakan harus mendapat masukan secara langsung dari berbagai sektor terkait, seperti dari sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan juga masukan dari organisasi masyarakat serta LSM. Sesuai dengan argumen yang dikemukakan di atas, alokasi dana untuk pengembangan sosial juga harus mencerminkan kebutuhan perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi sulit, misalnya anak jalanan dan buruh anak.
4. Perlunya peninjauan kembali perundang-undangan perlindungan anak yang berlaku, penegakan pelaksanaan dan revisinya, peraturan pelaksanaan yang lebih

keras serta perbaikan perundang-undangan. Kita memiliki instrumen hukum, seperti misalnya UU Kesejahteraan Anak, UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (No. 10/1992), UU Sistem Pendidikan Nasional, dan juga Garis Besar Haluan Negara yang secara eksplisit mengemukakan komitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun masalahnya, komitmen tersebut merupakan hasil kerja yang bersifat sektoral sehingga sosialisasinya pun hanya bersifat sektoral. Diperlukan usaha bersama untuk membuat agenda mengenai perlindungan anak sebagai komitmen nasional, sehingga harus dilaksanakan oleh semua sektor, industri dan bisnis (termasuk bisnis pariwisata). Masalah penting lainnya sehubungan dengan perangkat hukum yang sudah kita miliki adalah bahwa hal itu tidak ditegakkan secara tegas. Mengingat kita telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, diperlukan peninjauan mengenai perangkat hukum dan peraturan yang ada sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau penyusunan perangkat hukum baru yang benar-benar berjiwa demi kepentingan anak.

5. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga merupakan hal yang perlu dilakukan terutama kepada LSM yang menangani masalah sosial khususnya anak yang kini jumlahnya makin banyak. Di Bandung saja terdapat sekitar 15 LSM yang khusus menangani anak jalanan sementara kesiapan SDMnya belum sebanding dengan kuantitas dan kualitas masalah anak rawan. Pengembangan SDM ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan latihan, studi banding ke LSM yang sudah maju baik di dalam maupun di luar negeri, capacity building, dsb. Ini sangat penting mengingat akhir-akhir ini LSM lebih banyak di peran untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan mengurangi peran

pemerintah, sementara kuantitas dan kualitas pekerja sosial yang mendampingi anak sangat terbatas. Peningkatan profesionalisme melalui muatan studi sosial dan pekerjaan sosial ini sangat penting agar penanganan masalah sosial bisa dilakukan secara intensif, dan holistik/komprehensif. Ini bisa dilakukan antara melalui “reorganisasi” terhadap lembaga diklat profesi pekerjaan sosial untuk lebih terbuka terhadap kebutuhan diklat yang sesuai dengan orientasi pasar.

6. Seiring dengan Otda perlu peningkatan partisipasi LSM dalam pengadaan pelayanan umum. Pelimpahan wewenang ke suatu organisasi kemasyarakatan akhirnya dapat dianggap sebagai bentuk ideal dari kemandirian dan otonomi LSM-LSM atau organisasi sosial yang terlibat. Dalam melakukan usaha perlindungan terhadap anak, harus berusaha melibatkan berbagai pihak seperti LSM-LSM, universitas serta individu-individu yang memiliki keprihatinan terhadap masalah anak. Informasi mengenai bagaimana menghadapi kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak-anak perlu untuk lebih disebarluaskan pada masyarakat umum.. Karena LSM-LSM dan organisasi masyarakat telah memiliki pengalaman lebih dahulu dalam menangani masalah anak rawan, pihak pemerintah seyogyanya memanfaatkan potensi mereka, daripada membentuk proyek sendiri yang terpisah. Bila pemerintah mendukung LSM-LSM dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka mungkin akan lebih banyak hasil yang dapat dicapai. Adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk memberdayakan LSM dan organisasi masyarakat daripada sebaliknya menekan mereka.

7. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka bagi peneliti lain, praktisi dan pemerhati anak rawan yang berminat melakukan penelitian, pengembangan program dan pelayanan lanjutan terhadap anak rawan/ yang memerlukan perlindungan khusus dengan pendekatan yang berbeda, mengingat begitu kompliketdnya permasalahan anak rawan di Indonesia dan memerlukan perhatian yang serius, dan terus menerus dari berbagai disiplin dan berbagai instansi baik pemerintah maupun masyarakat.



Model P. IPS Terpadu Bagi Anak Rawan Melalui Selter Ideal

